

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan hubungan internasional di kawasan Asia Pasifik beberapa tahun terakhir ini telah membuat ASEAN tidak lagi menjadi objek dari persaingan negara-negara besar. Sebagai aktor penting dalam hubungan internasional di Asia Tenggara dan Asia Pasifik, ASEAN kini semakin asertif dalam menghadapi masalah-masalah hubungan internasional dengan mencari pendekatan-pendekatan baru kerja sama secara lebih luas.¹

Adanya perkembangan kerja sama ASEAN selama tiga dasa warsa lebih, ASEAN semakin memainkan peran penting dalam hubungan politik dan keamanan, ekonomi dan sosial budaya di antara bangsa-bangsa. Di samping itu ASEAN telah mampu mengembangkan daya adaptasinya menghadapi lingkungan politik dan ekonomi secara global yang akhir-akhir ini berubah secara cepat. Di masa mendatang ASEAN akan terus menghadapi berbagai tantangan sehingga keberadaan dan kelangsungan hidup ASEAN akan sangat tergantung pada tingkat kohesi ASEAN yang didasarkan atas ketahanan nasional negara-negara anggotanya.²

¹ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional*, Sinar Baru Algensindo, (Bandung:2003), h. 213.

² Hassan Wirajuda, *Hubungan Internasional Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka (Jakarta: 2005), h. 109.

Memasuki dekade ke-4 menuju terbentuknya komunitas ASEAN, tantangannya adalah mengisi soft power yang dimiliki secara dinamis, bertumpu pada kekuatan pendalaman maupun perluasan aktivitas kerja sama. *Shaping and sharing of norms* kemajuan kesepakatan yang dicapai dari naskah deklarasi, komunike bersama maupun rencana aksi harus dapat diwujudkan lebih membumi agar dapat memberi manfaat luas bagi publik.

Indonesia mengawali dengan menawarkan proyek implementasi VAP/ASC PoA menyangkut program sosialisasi bidang *peace keeping operation*, pembentukan mekanisme HAM ASEAN, studi model konflik dan penyelesaian sengketa, proyek studi ASEAN maritim forum hingga penyiapan *ASEAN institute for peace and reconciliation*. Di sini, penguatan institusi ASEAN dalam rangka lebih memasyarakat, termasuk mengaktifkan Sekretariat ASEAN di Jakarta, streamlining pertemuan ASEAN adalah revitalisasi yang diperlukan.

Tantangan rumit yang tidak kalah penting adalah dinamika konstituen domestik. Ketika kesepakatan dicapai, komponen masyarakat domestik di tiap negara ASEAN dapat merespons secara berbeda. Ada kalanya upaya maju di tingkat ASEAN, misalnya soal pembangunan politik dalam konteks implementasi ASEAN Security Community Plan of Action (ASC PoA), dimentahkan satu-dua negara hanya karena takut respons negatif domestik.³

³ SOM ASEAN Sepakati Konsep ASC.<http://www.kompas.com/>

Presiden Megawati Soekarnoputri menjelaskan, Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community/ASC) yang disepakati sebagai bagian dari disahkannya Bali Concord II, bukan merupakan pakta pertahanan, aliansi militer ataupun "kebijakan luar negeri bersama".

Sebelumnya, banyak pihak pesimistis akan adanya ASC namun Indonesia berhasil meyakinkan bahwa ASC memang urgen untuk dibentuk. Karena ingin mengetahui peran Indonesia dalam pembentukan ASC maka penulis memilih judul "peran Indonesia dalam pembentukan ASC" sebagai studi dalam penulisan skripsi ini.

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan jawaban dari rumusan masalah dan membuktikan kebenaran dengan teori serta data yang relevan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah awal ide dibentuknya ASC.
3. Untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang konsep ASC serta implikasinya bagi ASEAN serta negara-negara Asia Tenggara..
4. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan pemerintahan Republik Indonesia dalam membentuk ASC.
5. Untuk membuktikan teori-teori yang pernah penulis peroleh selama menempuh studi Ilmu Hubungan Internasional.

6. Untuk memenuhi prasyarat guna memperoleh gelar S1 ilmu hubungan internasional.

C. Latar Belakang Masalah

Tanggal 8 Agustus 2005 kita memperingati hari jadi ke-38 ASEAN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan, *A Lecture on the Occasion of the 38th Anniversary of the Association of Southeast Asian Nations* di Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta.

Sambutan Presiden RI tidak hanya memberi bobot perjalanan diplomasi maupun kebijakan luar negeri Indonesia di ASEAN. Pidato tahunan dalam kesempatan *ASEAN Day celebration* itu menandai dibukanya lembaran baru ASEAN dengan pergantian Ketua ASEAN Standing Committee (ASC) ke-39 dari Laos ke Malaysia, se usai berakhirnya Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/ AMM Ke-38), Post-Ministerial Conferences, dan Forum Regional ASEAN (ARF) Ke-12 di Vientiane, Laos, 23-29 Juli 2005.

Memasuki usia ke-38, gerak pendalaman (*deepening*) maupun perluasan (*expansion*) aktivitas kerja sama ASEAN menjadi peluang sekaligus tantangan yang terus dihadapi. Tanpa perlu menjadi supranational body, ASEAN mampu menjadi institusi longgar yang menggulirkan prakarsa, norma (*code of conduct*), sekaligus tradisi dan aktivitas yang kontributif bagi terciptanya perdamaian dan keamanan kawasan.

Soft power dalam konteks the ASEAN way telah memberi sumbangan nyata. Dari sisi ini, ASEAN mampu menepis keraguan akan manfaat dan relevansinya. Meski seperti organisasi regional lainnya, di sana-sini acap kali digelayuti masalah, ASEAN bergerak ke depan memberi sumbangan tidak sedikit bagi terciptanya iklim keamanan dan atmosfer perdamaian di kawasan.

Sering dilupakan dan dianggap remeh, perdamaian, *uninterrupted peace* di kawasan ini sebenarnya diciptakan, bukan tiba-tiba ada. Kawasan damai antarnegara dan menjadi barisan kawasan yang menjanjikan ini dibangun melalui sederet prakarsa politik, dialog, dan aktivitas.

Tidak dapat dimungkiri, ASEAN telah menjadi “sarang perlindungan keamanan” bagi publik, saat negara-negara kecil di kawasan itu takut dengan negara besar, saat kecurigaan dan ancaman dari tetangga ada di sekitar kita.

Perlindungan juga diperlukan saat masyarakat membutuhkan infrastruktur, perluasan dunia usaha, dan peningkatan kesejahteraan hidup; saat publik mengharap kebebasan untuk berkunjung ke negara tetangga tanpa visa dan dapat tinggal selama 30 hari di negara ASEAN; saat masyarakat kian membutuhkan demokrasi, keterbukaan, dan terselenggaranya *good governance*; saat masyarakat menghadapi aksi kekerasan terorisme, perompakan kapal di laut (*sea robbery*), wabah penyakit dan bencana alam, ASEAN ada di dekatnya dan mencarikan solusi bersama.

Sebagai ilustrasi, mulai dari dorongan untuk mentransformasikan AIPO (ASEAN Intra Parliament Organization), pengembangan mekanisme HAM ASEAN, penandatanganan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, MOU on ASEAN Cooperation for Preventing and Combating Corruption, pengembangan akses negara-negara non ASEAN ke dalam Treaty of Amity and Cooperation, penyiapan ASEAN convention to combat terrorism, membangun legal personality berupa ASEAN Charter hingga finalisasi instrumen ASEAN Agreement on Disaster Relief and Emergency Response termasuk embrio pembentukan ASEAN humanitarian assistance center adalah sebagian adaptasi ASEAN terhadap dinamika kebutuhan yang terus berkembang.

Sebagai langkah menjembatani komitmen ASEAN di tingkat atas dan kebutuhan publik, Indonesia memprakarsai kembali pertemuan tingkat pejabat senior (ASEAN SOM on Development Planning) yang menangani badan perencanaan nasional 12-14 Juli lalu di Bali untuk saling berdialog, mengoordinasikan, dan mensinergikan program implementasi kerja sama ASEAN dalam kerangka Vientiane Action Program (VAP) termasuk rencana aksi Komunitas Keamanan ASEAN (ASC-PoA) maupun proses integrasi ASEAN secara luas dengan program perencanaan pembangunan di tingkat nasional di masing-masing negara ASEAN. Melalui mekanisme ini, kerja sama ASEAN diharapkan lebih terintegrasi, membumi, dan terefleksikan dalam kegiatan nasional di 10 negara anggota berbeda, menuju komunitas ASEAN.

Para pejabat tinggi ASEAN pada akhirnya berhasil menyepakati konsep Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community/ASC). Kesepakatan itu memungkinkan ASEAN mencapai satu komunitas dengan tingkat keamanan yang menyeluruh atau komprehensif.

Menurut Makarim Wibisono, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri, Indonesia berusaha meyakinkan konsep ASC tidak akan mengarah pada pembentukan pakta atau kerja sama militer. Namun, Filipina dan Thailand justru keberatan dengan hal tersebut. Kedua negara masih menghendaki semua pihak untuk tidak menghapus kemungkinan kerja sama militer tersebut. Dengan alasan, tidak ada satu pihak pun yang akan tahu perkembangan nanti.

Untuk mengatasi hal itu, SOM sepakat merumuskan ASC menjadi satu komunitas yang akan tetap mempertimbangkan kesinambungan antara realitas politik, ekonomi, dan sosial. Karena itu, ASC lebih menempatkan prinsip keamanan yang komprehensif daripada sebuah pakta pertahanan, aliansi militer, atau kebijakan bersama di bidang politik luar negeri. Dengan kata lain, ASC menempatkan satu konsep keamanan dengan aspek sangat luas dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kultural selaras dengan visi ASEAN 2020. Adalah kebutuhan, kesepakatan ASEAN berupa deklarasi, komunike bersama, dan rencana aksi dapat dimasyarakatkan ke semua tingkatan agar komponen domestik dengan comfort level berbeda dapat memahami keputusan secara lebih hidup.

merupakan salah satu kepentingan Indonesia yang diperjuangkan Indonesia dengan upaya pembentukan ASC.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: " **Bagaimana peran Indonesia dalam pembentukan ASC "**?"

E. Kerangka Berfikir

Dalam menjawab rumusan masalah yang ada, penulis menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut:

1. Teori Peranan (*role theory*)

Teori peranan menjelaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori tersebut berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Keputusan yang dibuat menteri luar negeri saat ia menjalankan suatu peranan atau serangkaian peran, merupakan hal yang penting untuk diperhatikan menurut teori peranan.⁶

Berlandaskan teori peranan, dapat dipahami bahwa Indonesia dalam pembentukan ASC berperan sebagai pencetus awal ide tersebut. Indonesia merasa perlu untuk memperhatikan kondisi keamanan anggota ASEAN,

sehingga sudah saatnya membentuk komunitas yang menjaga keamanan demi menjaga stabilitas keamanan bersama. Selain itu Indonesia juga berperan aktif dalam mensosialisasikan ide terbentuknya ASC pada anggota-anggota ASEAN. Diketahui bahwa pada awalnya ada beberapa anggota yang tidak setuju adanya ASC. Perna aktif Indonesia tidak terhenti hanya sampai sosialisasi, namun hingga terbentuknya ASC Indonesia berperan aktif.

Menurut John Wahlke, teori peran mempunyai dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Pertama ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi, kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Kerangka berfikir teori peranan memandang individu sebagai seseorang yang tergantung pada dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. Kedua, teori peranan mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara behavioral.⁷ Dalam pandangan teoritis peranan, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan.

Dipahami bahwa peran Indonesia dalam pembentukan ASEAN Security Community atau ASC berperan sebagai pencetus ide atau gagasan terbentuknya ASC, serta mensosialisasikan ASC pada anggota-anggota ASEAN. Indonesia ikut serta dalam memperhatikan kondisi keamanan anggota ASEAN, yang terlibat dalam pembentukan ASC sehingga sudah

⁷ *Ibid.*, h.255.

saatnya membentuk komunitas yang menjaga keamanan demi stabilitas keamanan bersama. Dalam hal ini peranan Indonesia selain menjaga stabilitas keamanan antar anggota ASEAN dalam ASC yang disepakati sebagai bagian dari disahkannya Bali Concord 11, bahwa peran Indonesia juga sangat memperhatikan dalam hubungan politik, ekonomi, dan sosial budaya antar negara-negara ASEAN Security Community atau ASC.

Dengan adanya situasi yang aman dalam anggota ASEAN dapat menstimulus adanya kerjasama yang semakin harmonis antar anggota. Untuk itu penelitian juga menggunakan teori kerjasama internasional dalam menganalisa permasalahan yang ada.

2. Teori Kerjasama

Adanya situasi yang aman dalam anggota ASEAN dapat menstimulus adanya kerjasama yang semakin harmonis antar anggota. Untuk itu penelitian ini juga menggunakan teori kerjasama dalam menganalisa permasalahan yang ada.

Globalisasi adalah suatu keadaan dimana dunia terlihat dan terasa sempit akibat arus informasi teknologi dan transportasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan perkembangan dan perubahan dunia yang sangat cepat. Bagi Negara-Negara Sedang Berkembang (NSB) merasa berat untuk dapat memenuhi atau mengikuti perubahan yang cepat dan

Manusia (SDM). Jadi, yang tidak mampu akan terpuruk dan termarginalkan.⁸

Teori kerjasama internasional berasumsi bahwa untuk dapat mengembangkan diri, setiap negara perlu melakukan kerjasama dengan negara lain yang berlaku secara internasional. Kerjasama internasional tidak dapat dihindari karena antar negara memiliki kepentingan di dalamnya.

Dengan dunia yang semakin transparan, ancaman dan tantangan semakin mudah melalui lintas batas, semakin mendorong adanya kebutuhan untuk saling melindungi dan saling mengamankan di antara negara yang berdekatan, berarti perlu adanya kerjasama internasional maupun regional di bidang keamanan.

ASEAN sebagai regional grouping dalam bidang keamanan (ARF) sudah menjadi pengkuan dari kawasan lain. Karena itu, ASEAN sebagai pengganda bidang keamanan dapat dijadikan batu penjurur (*CORNER STONE*) dari politik pertahanan Indonesia. Disamping itu, ASEAN adalah satu kawasan vital bagi pembangunan dan perkembangan bangsa dan negara Indonesia.

Kerjasama yang ada di ASEAN antara lain adalah dibidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kerjasama tersebut tidak dapat berjalan lancar apabila kondisi keamanan negara anggota ASEAN terganggu. Untuk itu kerjasama di bidang keamanan menurut Indonesia perlu dilakukan. Dalam kaitan pengaturan keamanan regional Asia Tenggara itu, Indonesia

⁸ http://www.paskal8.com/hasilkajian_21.htm

melontarkan gagasan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community/ASC). ASC merupakan forum kerja sama yang perlu dibentuk untuk membarengi forum kerja sama lainnya utamanya ekonomi yang sudah berjalan sejak awal pembentukan ASEAN pada tahun 1967. Kerja sama militer merupakan salah satu aspek dalam ASC. Aspek-aspek yang tidak kalah penting dalam ASC antara lain kerja sama untuk menciptakan aturan-aturan dalam berinteraksi dan menetapkan mekanisme penyelesaian perselisihan di antara negara-negara anggota ASEAN.

Bahwa dalam pembentukan ASEAN Security Community atau ASC, kerjasama internasional yang terbentuk di dalamnya antar negara-negara ASEAN yang menjembatani pembentukan ASC Indonesia bekerjasama dalam bidang politik demi kestabilan politik antar anggota ASEAN. Selain itu Indonesia juga bekerjasama dalam bidang ekonomi, yang mana Indonesia dengan negara-negara ASEAN saling membantu masalah perekonomian antar negara tersebut. Pertukaran sosial budayapun menjadi motivasi dalam kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam pembentukan ASC sehingga dalam kerjasama internasional ini dapat berjalan dengan lancar, karena keamanan antar anggota ASEAN terjamin dengan adanya ASC.

F. Hipotesa

Berdasarkan uraian dan kerangka berfikir tersebut, maka hipotesa dari rumusan masalah yang ada yaitu :

Peran Indonesia dalam Pembentukan ASC: Indonesia pemrakarsa pembentukan komunitas keamanan Asean (ASC), mensosialisasikan dan memfasilitasi pembentukan ASC tersebut kepada anggota ASEAN, hingga usaha terbentuknya ASC.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan teori kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris.

Tehnik pengumpulan yang digunakan adalah teknik *library research* atau penelitian kepustakaan serta memperhatikan rekaan-rekaan informasi tertulis yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar, serta catatan, catatan lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan fasilitas perpustakaan.

Metode Analisis Data

Untuk menganalisa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha menguraikan atau menjelaskan dengan kalimat, data-data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data yang bersifat teoritis digunakan sebagai landasan perspektif untuk mendeteksi masalah, dan data yang bersifat deskriptif untuk mendukung dan memperkuat serta menjelaskan permasalahan yang ada, yaitu peran Indonesia dalam pembentukan ASC.

H. Jangkauan Penelitian

Fokus penelitian ini dilakukan mulai tahun 2003 dimana usul Indonesia tentang Komunitas Keamanan ASEAN (ASC) yang disepakati pada pertemuan pejabat tinggi (SOM ASEAN) di Senggigi, Lombok, 12 September 2003, hingga 2005. Walaupun begitu data-data sebelum tahun 2003 dan sesudahnya tahun tersebut tetap menjadi sumber data penelitian.